

PEMIKIRAN PEMUKA AGAMA KATOLIK INDONESIA TENTANG IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA PANCASILA

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Email: joshuajollysc1723@gmail.com

Abstract

As part of Indonesia, Catholics also play an important role in the life of the Indonesian nation and state. Among these roles and contributions are revealed through the thoughts of their leaders, both priests, bishops, and cardinals. This article wants to reveal and review some of the thoughts of Catholic religious leaders related to the issue of ideology and the basis of the Indonesian state, namely Pancasila. The five Catholic religious leaders discussed here are Soegijapranata, Drijarkara, Magnis-Suseno, Darmaatmadja, and Suharyo. In terms of ideology and the basis of the state, these five leaders discussed, among other things, issues of the relationship between religion and the state, education, political ethics, general welfare, and calling for life. From the exploration of the five thoughts, this article shows the Indonesian Catholic Church accepts Pancasila as the principle of life in society, nation and state. The views of the five leaders discussed showed the harmony of Pancasila values with the teachings of the Catholic faith. All elements of the Catholic Church, both hierarchical and lay, have the responsibility to advance the life of the Indonesian people, nation and state based on Pancasila; a shared responsibility of all elements of the nation. Thus, the motto "100% Catholic, 100% Indonesian", which was originally conveyed by Soegijapranata, has become more grounded in Indonesia.

Keywords: *Thoughts; Catholic Religious Leaders; Catholic Faith; Pancasila; Indonesia.*

Abstrak

Sebagai bagian dari Indonesia, umat Katolik juga berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di antara peran dan kontribusi tersebut terungkap melalui pemikiran para pemukanya, baik pastor, uskup, maupun kardinal. Artikel ini ingin mengungkap dan mengulas beberapa pemikiran dari pemuka agama Katolik yang terkait dengan persoalan ideologi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lima pemuka agama Katolik yang dibahas di sini ialah Soegijapranata, Drijarkara, Magnis-Suseno, Darmaatmadja, dan Suharyo. Berkaitan dengan ideologi dan dasar negara, kelima pemuka ini membahas antara lain persoalan hubungan agama dan negara, pendidikan, etika politik, kesejahteraan umum, dan panggilan hidup. Dari penggalan pemikiran kelimanya, artikel ini menunjukkan Gereja Katolik Indonesia menerima Pancasila sebagai asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Padangan kelima pemuka yang dibahas memperlihatkan keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran iman Katolik. Seluruh elemen Gereja Katolik, baik hierarki maupun awam, memiliki tanggung jawab untuk memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila; suatu tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, semboyan "100% Katolik 100% Indonesia", yang pada mulanya disampaikan Soegijapranata, makin membumi di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemikiran; Pemuka Agama Katolik; Iman Katolik; Pancasila; Indonesia.*

A. Pendahuluan

Gereja Katolik merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, Gereja Katolik turut berperan untuk menjadi(kan) Indonesia meski menjadi kelompok minoritas. Hal ini termaktub jelas dalam semboyan yang terkenal dari Uskup Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, yaitu “100% Katolik 100% Indonesia” (Utami, 2012: 132). Dengan kata lain, semboyan ini menjadi konklusi tegas bahwa umat Katolik di Indonesia terpanggil untuk mengabdikan, baik kepada Gereja maupun kepada tanah air, *pro Ecclesia et patria*. Bahkan, A. Eddy Kristiyanto, OFM (2015: 207) menegaskan bahwa “andai kata Indonesia tanpa Katolik, maka itu bukan Indonesia. Sebab republik ini tidak pernah secara konstitusional mengeksklusikan minoritas Katolik.”

Peran Gereja Katolik sepanjang sejarah Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran abstrak dan peran konkret. Peran abstrak dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk pemikiran dan pandangan yang turut mengonsepsi atau membentuk alam pikir keindonesiaan. Di sisi lain, peran konkret terwujud dalam hal-hal nyata dan terlihat, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Pada hakikatnya, kedua peran ini merupakan respons atau tanggapan atas dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus memiliki dampak atasnya. Dengan demikian, peran ini lahir secara timbal-balik atau dua arah.

Jika melihat peran konkret, kontribusi Gereja Katolik tidak dapat dimungkiri. Kristiyanto menyebut bahwa kiprah Gereja Katolik di Indonesia “nyaris” identik dan dikenal luas dengan keberadaan sekolah, rumah sakit, dan pelayanan sosial-karitatif (Kristiyanto, 2015: xxxviii-xxxix). Hal ini memang tidak dapat dinafikan, sebab identitas demikian telah terbentuk dan terwariskan sejak misionaris asing memulai penginjilan di Indonesia hingga dilanjutkan oleh misionaris bumiputra saat ini.

Di samping peran yang konkret, kontribusi pemikiran yang bersifat abstrak juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemikiran-pemikiran ini lahir dari sejumlah pemuka agama Katolik, baik pastor, uskup, maupun kardinal. Mereka menuangkan gagasannya terkait permasalahan bangsa dan negara dengan kaca mata iman Katolik. Dengan demikian, pemikiran ini tidak hanya berdampak bagi umat Katolik, tetapi bagi masyarakat Indonesia secara umum.

Banyak pemikiran telah diungkapkan dan menjadi pemantik diskursus atas fenomena keindonesiaan yang semakin marak akhir-akhir ini. Salah satu hal yang acapkali diutarakan berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut belum diketahui banyak tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh umat Katolik sendiri. Oleh sebab itu, penyebarluasan gagasan tersebut sangat diperlukan mengingat relevansi pemikiran tersebut dalam situasi aktual kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini.

Meski pemikiran-pemikiran para pemuka agama Katolik tersebut telah dituangkan dalam berbagai buku, tidak dapat disangkal bahwa pemikiran tersebut belum membumi sepenuhnya sehingga dapat menjadi salah satu landasan kebijakan konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, analisis (penguraian) dan sintesis (penyatuan) pemikiran-pemikiran tersebut menjadi penting dan perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah pemikiran para pemuka agama Katolik di Indonesia tentang ideologi dan dasar negara Pancasila. Para pemuka agama Katolik tersebut meliputi Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ; Pastor Nicolaus Drijarkara, SJ; Pastor Franz Magnis-Suseno, SJ; Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ; dan Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo. Kelima pemuka agama Katolik ini dipilih dengan alasan mereka telah menuangkan

gagasannya dalam berbagai bentuk publikasi yang tersedia dan pemikiran tersebut masih relevan dengan situasi dewasa ini.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam metode ini, terdapat tiga proses penting, yaitu pengumpulan data; kritik terhadap sumber; dan penyusunan atau pengorganisasian hasil penelitian. Dalam tahap terakhir ini, pola berpikir analitis (menguraikan) dan sintetis (menyatukan) digunakan. Pada akhirnya, penelitian ini merupakan penelitian kronologis dan deskriptif yang bermaksud menggambarkan dan mengungkapkan kejadian-kejadian menurut urutan waktunya (Nawawi, 2019: 85-87).

B. Pembahasan

1. Pemikiran Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ tentang Pancasila

Albertus Soegijapranata atau yang bernama lengkap Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ adalah uskup bumiputra pertama di Indonesia. Ia lahir di Surakarta pada 25 November 1896 di Surakarta dengan nama kecil Soegija. Ia adalah murid dari Romo Fransiskus van Lith, SJ, seorang misionaris Katolik dari Belanda di Muntilan, Jawa Tengah. Soegija dibaptis pada 24 Desember 1910. Nama baptis yang dipakainya adalah Albertus (Subanar, 2003: 20 & 40).

Soegija memutuskan untuk menjadi imam dalam *Societas Jesu* (SJ/Serikat Yesus) atau Yesuit seperti gurunya. Pada 15 Agustus 1931, ia menerima tahbisan imam di Maastricht, Belanda. Setelah ditahbiskan, ia menambahkan kata “pranata” di belakang namanya sehingga menjadi Albertus Soegijapranata (Subanar, 2003: 89-91).

Tidak sampai satu dekade menjadi imam, Romo Soegija,

demikian disapa, ditunjuk oleh Paus Pius XII menjadi Vikaris Apostolik (setara uskup) Semarang. Ia ditahbiskan sebagai uskup pada 6 November 1940 di Semarang. Mgr. Soegija pun memainkan peranan penting, terlebih Hindia-Belanda dan dunia pada waktu itu berada dalam ancaman situasi Perang Dunia II (Subanar, 2003: 128-133).

Ketika Hindia-Belanda jatuh ke tangan Jepang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Mgr. Soegija berani membela umat dan menjadi penengah untuk mencapai gencatan bersenjata. Ia juga berdiri di belakang republik pimpinan Sukarno-Hatta dengan memindahkan pusat keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta ketika ibu kota negara berpindah. Di samping itu, melalui Mgr. Soegija, Vatikan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dengan mengirimkan delegasi apostolik Mgr. George de Jonge d’Ardoya pada 1947. Atas jasanya ini, ia disapa “Romo Agung” oleh Sukarno dan digelar pahlawan nasional ketika wafat pada 22 Juli 1963 saat menghadiri Konsili Vatikan II. Pada akhirnya, ia terkenal dengan satu formulanya yang penting, “100% Katolik, 100% Indonesia” (Utami, 2012: 87-107 & 130-132).

Dukungannya yang besar atas republik yang baru saja berdiri ini terlihat dari buah-buah pemikirannya. Bersama dengan umat Katolik Indonesia, Mgr. Soegija menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila karena sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan jaminan sepenuh-penuhnya bagi kebebasan memeluk agama” (Muskens, 1973: 334).

Ia bersama Ignatius Joseph Kasimo menginisiasi Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI)

yang dilaksanakan dua kali, yaitu pada 7-12 Desember 1949 di Yogyakarta dan pada 27-29 Desember 1954 di Semarang. Hasil penting KUKSI I adalah pembentukan Partai Katolik. Selanjutnya, dalam KUKSI II, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dengan membentuk serikat-serikat yang tidak pertama-tama membawa nama Katolik, melainkan nama Pancasila, seperti Organisasi Buruh Pancasila. Usaha yang dimulai dari Vikariat Apostolik (Keuskupan) Semarang ini tidak terlepas dari peran Mgr. Soegija (Gonggong, 1983: 91).

Selanjutnya, ketika keadaan politik Indonesia pada 1950-an tidak stabil, ia kembali menegaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus bagi umat Katolik. Pada Maret 1954, Mgr. Soegija berujar sebagai berikut:

“Umat Katolik sebagai warga-negara Indonesia tidak cukuplah kiranya mengunjungi gereja dan bersembahyang saja, tetapi mereka lebih-lebih harus berani menceburkan diri ke dalam masyarakat agar secara materiil dan rohaniah dapat memberikan sumbangan mereka melalui jalan ikut serta dalam gerakan-gerakan massa, yang benar-benar merupakan pendukung cita-cita negara, Pancasila, yang selaras dengan kesepuluh perintah Allah” (Muskens, 1973: 401).

Ketika pemilihan umum pertama kali diselenggarakan pada 1955, Mgr. Soegija memperingatkan bahwa telah tampak gejala yang cukup membahayakan negara Pancasila, yaitu kemenangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 2 November 1955, bersama dengan para uskup se-

Indonesia, ia membuat pernyataan sebagai berikut, *“Pancasila dalam arti kata murni dan sejati, apalagi yang hidup beragama sebagai keyakinan dalam budi dan hati, dapat mencegah meresapnya ilmu marxisme materialisme”*. Dengan kata lain, Mgr. Soegija bersama para uskup membela Pancasila untuk mengimbangi menjalarnya ajaran komunis (Muskens, 1973: 405-406).

Menjelang akhir 1950-an dan awal 1960-an, ketika krisis politik tidak kunjung mereda, Mgr. Soegija kembali memperingatkan gagasan Presiden Sukarno yang hendak menyatukan tiga ideologi di bawah Nasakom (nasionalis-agama-komunis). Ia bahkan menyurati Presiden Sukarno, bahwa *“Nasakom berarti perongrongan terhadap gagasan nilai yang terkandung dalam Pancasila”* karena *“komunisme dan dengan orang-orang komunis memang tidak dapat memenuhi cita-cita nasional negara kita”* (Gonggong, 1983: 109). Meskipun demikian, gagasan ini tetap diberlakukan Presiden Sukarno sebagai manifesto politik hingga akhir masa jabatannya pada 1966.

2. Pemikiran Pastor Nicolaus Drijarkara, SJ tentang Pancasila

Nicolaus Drijarkara merupakan seorang pastor dan filsuf yang kemudian diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara Jakarta. Ia lahir di Purworejo pada 13 Juni 1913 dan wafat di Jakarta pada 11 Februari 1967. Nama kecilnya adalah Djentoe (Jenthu). Ia kemudian mengganti namanya menjadi Soehirman ketika bersekolah di HIS. Pada 22 Desember 1925, ia dibaptis dengan nama baptis Nicolaus, sehingga ia bernama lengkap Nicolaus Djentoe Soehirman (Treurini, 2013: 25, 188, & 226).

Soehirman memutuskan untuk menjadi pastor Katolik. Saat menjadi *frater* (calon pastor) sejak 1935, ia mengganti namanya menjadi Drijarkara yang merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu *drija* (terlihat), *arka* (matahari), dan *kara* (senandung pujian). Akhirnya, Drijarkara ditahbiskan sebagai imam Yesuit pada 6 Januari 1947. Ia kemudian melanjutkan studi filsafatnya hingga meraih gelar doktor di Roma (Treurini, 2013: 102 & 226).

Sepulangnya ke Indonesia, Drijarkara menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (sekarang Seminari Tinggi) di Yogyakarta. Ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus rektor pertama IKIP Katolik Yogyakarta yang kemudian menjadi Universitas Sanata Dharma. Sejak 1960, ia diangkat sebagai guru besar luar biasa di Universitas Indonesia dan Hasanuddin (Treurini, 2013: 226).

Drijarkara dikenal sebagai salah satu filsuf Katolik yang disegani, tidak hanya oleh umat Katolik, melainkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai pendidik, ia menuangkan banyak pemikirannya terkait pendidikan yang juga berhubungan dengan Pancasila. Salah satunya adalah pidato Panca-Prasetya yang diucapkan di hadapan Presiden Sukarno dan berbagai tokoh penting pada 8 April 1961. Ia menegaskan bahwa Panca Prasetya adalah wujud tekad sivitas akademika IKIP Katolik Yogyakarta untuk setia terhadap dasar negara Pancasila (Treurini, 2013: 227-231).

Pidato ini tidak terlepas dari ceramah bertajuk “Pancasila dan Religi” yang dibawakannya pada 1959 dalam Seminar Pancasila di Yogyakarta. Seminar ini merupakan cara Sukarno memperoleh legitimasi ilmiah untuk mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara (Treurini, 2013: 140). Ceramah

Drijarkara ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul *Pantja Sila and Religion*. Buku ini disebarluaskan oleh kedutaan-kedutaan besar Republik Indonesia di berbagai negara (Sudiarja et al., 2006: xxxviii-xxxix).

Kumpulan pemikiran Drijarkara dibukukan dalam *Karya Lengkap Drijarkara* yang tebalnya lebih dari 1.500 halaman. Secara khusus, pemikirannya terkait Pancasila dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemikiran sebelum 1965 dan pemikiran sesudah 1965. Dalam pemikiran sebelum 1965, Drijarkara menulis “Telaah Hakikat Religi” dan “Pertemuan Pancasila dan Religi”. Dalam tulisan pertama, ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat tidak bertentangan dengan religi, “Pada dasarnya, Pancasila itu adalah eka sila, yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak mungkin bisa bertentangan dengan Religi. Malahan sebaliknya, Pancasila merupakan dukungan bagi Religi” (Sudiarja et al., 2006: 857).

Pernyataan ini ditegaskannya dalam tulisannya yang kedua. Meski eka sila ditegaskan oleh Sukarno sebagai gotong royong, Drijarkara menafsirkannya sebagai pemenuhan sila ketuhanan dan peri kemanusiaan sekaligus. Selain itu, Pancasila adalah cerminan hubungan antara negara dan agama/religi “yang sebaik-baiknya”. Kesimpulannya ia nyatakan, “Negara Pancasila bukan negara agama, ... tetapi sama sekali bukanlah negara profan. Dengan demikian, negara Pancasila memberi tempat yang sewajarnya kepada Religi ... dan mengakui ketinggian dan kesucian hidup” (Sudiarja et al., 2006: 859 & 863-865).

Sesudah 1965, Drijarkara menegaskan perlunya “kembali ke Pancasila dengan murni dan

konsekuen.” Dalam hal ini, menyebut bahwa sila keadilan sosial, demokrasi, dan peri kemanusiaan sebagai prinsip langsung bernegara tidaklah bertentangan dengan sila ketuhanan sebagai prinsip tidak langsung, bahkan saling melengkapi dalam kehidupan bernegara (Sudiarja et al., 2006: 930-934). Jika sila ketuhanan mencerminkan *idea of God* (citra Tuhan) yang melekat pada manusia, sila yang lain mencerminkan *idea of man* (citra manusia). Drijarkara dalam tulisannya “Gambaran Manusia Pancasila” menguraikan lebih panjang tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila, secara khusus pada keempat sila yang merefleksikan *idea of man* tersebut, yaitu keadilan sosial, demokrasi, kebangsaan, dan peri kemanusiaan (Sudiarja et al., 2006: 940-959).

Pada akhirnya, selain sarat dengan nilai keindonesiaan, pemikiran Drijarkara juga diterangi oleh iman Katolik. Hal ini terlihat jelas dalam pernyataannya bahwa sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat selaras dengan hukum utama dalam iman Katolik, yaitu cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama.

3. Pemikiran Pastor Franz Magnis-Suseno, SJ tentang Pancasila

Franz Magnis-Suseno, SJ adalah seorang rohaniwan sekaligus guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Ia lahir pada 1936 di Jerman dengan nama Franz von Magnis dan mulai menetap di Indonesia pada 1961. Enam tahun kemudian, ia ditahbiskan sebagai imam Yesuit di Yogyakarta. Satu dekade berselang, ia memperoleh status warga negara Indonesia, dan namanya berubah menjadi Franz Magnis-Suseno hingga kini. Ia

menekuni studi filsafat, teologi, dan teori politik. Selain itu, Magnis-Suseno dikenal dengan banyak karyanya bertemakan filsafat ketuhanan, etika, filsafat politik, dan alam pikiran Jawa (Magnis-Suseno, 2017: 214).

Secara umum, Magnis-Suseno menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang juga selaras dengan ajaran iman Katolik. Ia mengaitkannya dengan delapan prinsip etika politik Katolik sebagai salah satu hasil Konsili Vatikan II, yaitu prinsip kebaikan hati, prinsip keberpihakan pada kehidupan, prinsip kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, prinsip solidaritas, prinsip hak-hak asasi manusia, prinsip penolakan terhadap kekerasan, dan prinsip persaudaraan semesta (Magnis-Suseno, 2017: 184c185). Oleh sebab itu, terkait Pancasila ia menulis kesimpulan tegas sebagai berikut.

“Sudah jelas bahwa Gereja Katolik di Indonesia sepenuhnya mendukung Pancasila. Gereja sendiri mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan manusia, tetapi tidak mempunyai ideologi politik sendiri. Setiap bangsa harus menggali dan merumuskan sendiri filsafat yang mendasarinya, itu pun atas dasar nilai-nilai budaya serta pengalaman sejarahnya sendiri. Ternyata lima sila Pancasila amat sesuai dengan pandangan Katolik tentang masyarakat yang menghormati martabat manusia sebagaimana dikehendaki Allah. Delapan prinsip etika politik Katolik yang dirumuskan di atas semuanya tertampung amat bagus dalam Pancasila” (Magnis-Suseno, 2017: 188).

Selanjutnya, ia menulis perincian keselarasan delapan prinsip etika politik Katolik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

“Sila pertama memuat kebebasan beragama. Sila kedua mendukung hak-hak asasi manusia, menuntut penolakan terhadap kekerasan dan sebaliknya berpihak pada kehidupan. Prinsip kedelapan, persaudaraan semesta yang memang baru sejak 50 tahun masuk dalam kesadaran publik dapat ditampung di sila kedua Pancasila karena manusia yang adil dan beradab, akan beradab juga dalam sikapnya terhadap alam. Sila ketiga dan kelima memuat prinsip solidaritas. Sila keempat memuat hak-hak asasi manusia, salah satu daripadanya adalah demokrasi. Sila kelima jelas memuat prinsip kebaikan hati dan kesejahteraan umum serta hak asasi mereka yang ketinggalan atas dukungan masyarakat” (Magnis-Suseno, 2017: 188).

Pada dasarnya, prinsip etika politik Katolik adalah prinsip etika politik universal. Magnis-Suseno menyebutnya sebagai “etika politik pasca-tradisional”. Ia mengulang kembali keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip etika politik universal tersebut. Sila pertama ia sandingkan dengan kebebasan beragama dan pluralisme. Sila kedua disandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, hak-hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana pemecahan konflik. Sila ketiga disandingkan dengan nasionalisme. Sila keempat disandingkan dengan demokrasi. Terakhir, sila kelima ia sandingkan

dengan solidaritas bangsa negara adil sejahtera (Sastrapratedja, 2016: 70).

Dengan keselarasan tersebut, Magnis-Suseno mendorong Pancasila agar diaktualisasikan dan direvitalisasi. Ia mengatakan, “Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tak bukan tak lain adalah kesediaan untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing, jadi kesediaan untuk menghormati dan mendukung kemajemukan bangsa dan untuk senantiasa menata kehidupan bangsa Indonesia secara inklusif (Sastrapratedja, 2016: 71). Dengan demikian, Magnis-Suseno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia selaras dengan ajaran iman Katolik, secara khusus dalam etika politik Katolik.

4. Pemikiran Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ tentang Pancasila

Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ adalah Uskup Agung Semarang (1983-1996), Uskup Agung Jakarta (1996-2010), dan kardinal kedua dari Indonesia yang telah dilantik sejak 1994. Ia lahir pada 20 Desember 1934 di Salam, Magelang, Jawa Tengah. Ia ditahbiskan sebagai imam pada 18 Desember 1969 dan sebagai uskup pada 29 Juni 1983.

Selain sebagai uskup agung di Semarang dan Jakarta serta kardinal, Darmaatmadja juga menjadi Vikaris Militer Indonesia (sekarang Uskup Ordinariat Militer) sejak 1984 hingga 2006. Ia juga menjadi Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada periode 1988-1997 dan 2000-2006. Oleh sebab itu, ia sering memberikan ceramah, baik kepada umat TNI/POLRI maupun umat secara umum mewakili suara para uskup se-Indonesia.

Dalam konteks umum di Indonesia, Darmaatmadja menyebut bahwa keterlibatan Gereja dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tugas suci. Itu berarti setiap elemen Gereja, baik hierarki (uskup, imam, dan diakon), biarawan-biarawati, dan umat awam terpanggil untuk tugas mulia tersebut. Akan tetapi, ia juga menegaskan rambu-rambu yang perlu dipatuhi. Misal, hierarki dan biarawan-biarawati tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Apa yang tidak dapat dijalankan oleh hierarki dan biarawan-biarawati merupakan tugas umat awam. “Keterlibatan hierarki dan biarawan-biarawati ada batasannya sehingga dibutuhkan keterlibatan penuh kaum awam. Hal ini terungkap dalam hukum Gereja,” tulisnya (Darmaatmadja, 2019: 81-87).

Sebagaimana para pemikir Katolik sebelumnya, Darmaatmadja mengamini nilai-nilai Pancasila selaras dengan terang iman Katolik. Ia kembali menuangkan pemikirannya bagaimana mengamalkan Pancasila dalam terang iman Katolik. Di samping itu, ia juga menambahkan satu hal penting, yakni kerja sama erat dengan umat beragama dan berkeyakinan lain adalah perlu untuk menegaskan inklusivitas dan pluralisme khas Indonesia. Singkat kata, menghayati hidup berbangsa dan bernegara bagi orang Katolik dengan terang Pancasila berarti merujuk pada hukum ganda, yaitu kasih kepada Allah dan sesama, sebagaimana termaktub dalam Injil Matius 22:37-39 (Darmaatmadja, 2019: 88-95).

Lebih lanjut, Darmaatmadja menjabarkan pemikirannya untuk “menjadi katolik, nasionalis, dan Pancasilais sejati” dalam dua bukunya. Dalam buku pertama, ia menerangkan bahwa keterlibatan aktif Gereja dalam menghidupkan dasar negara Indonesia Pancasila dalam kehidupannya dengan

terang iman Kristiani sangat dibutuhkan. Orang Katolik meyakini bahwa wawasan Pancasila selaras dengan wawasan Katolik. Dengan kata lain, melaksanakan dan mengamalkan Pancasila bagi umat Katolik Indonesia dapat dijadikan perwujudan konkret penebusan dan penyelamatan. Hal ini selaras dengan sabda Injil Matius 22:21 bahwa orang Katolik di Indonesia terpanggil sebagai warga negara untuk mengamalkan Pancasila dan sebagai seorang beriman untuk mengabdikan kepada Allah (Darmaatmadja, 2020a: 172, 253, & 343).

Hal senada ditegaskannya dalam buku kedua. Darmaatmadja menyebut bahwa panggilan orang Katolik untuk mengabdikan kepada Gereja dan tanah air (*pro Ecclesia et patria*) harus dijalankan secara taat. Ia menulis, “Ketaatan kita memilih yang baik sesuai dengan Pancasila akan menjamin kemerdekaan seluruh rakyat. Sebagai orang Katolik, kita pun memperoleh ajaran senada.” Dalam bahasa lain, ia menyerukan agar pengamalan Pancasila dihayati sebagai salah satu wujud pertobatan (Darmaatmadja, 2020b: 102 & 116). Sekali lagi, Darmaatmadja kembali menegaskan keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran iman Katolik, seperti hukum kasih dan sabda mengabdikan kepada negara sekaligus kepada Allah.

5. Pemikiran Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo tentang Pancasila

Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo adalah Uskup Agung Semarang (1997-2009), Uskup Agung Jakarta (2010-sekarang), dan kardinal ketiga dari Indonesia sejak 2019 hingga sekarang. Ia lahir pada 9 Juli 1950 di Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ditahbiskan sebagai imam pada 26

Januari 1976 dan sebagai uskup pada 22 Agustus 1997.

Suharyo menjadi pemegang estafet kepemimpinan dari Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja. Selain menjadi uskup agung di Semarang dan Jakarta, ia juga menjadi Uskup Ordinariat Militer Indonesia sejak 2006 hingga sekarang. Di samping itu, ia juga menjadi Ketua KWI selama tiga periode, sejak 2012-2015, 2015-2018, dan 2018-2021.

Tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya, Suharyo kembali menegaskan keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan terang iman Katolik. Ia menuangkan gagasannya ke dalam buku bertajuk *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*. Dalam buku tersebut, ia pertama-tama menerangkan bahwa hubungan antara Gereja dan negara pada dasarnya dapat berjalan harmonis. Suharyo mengutip dua kesimpulan Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*).

Pertama, tujuan usaha antara negara dan Gereja adalah sama, yaitu manusia. *Kedua*, dalam menjalankan tugas usaha itu, baik Gereja maupun negara, adalah otonom. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan yang diselenggarakan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Di sisi lain, Gereja mempunyai panggilan sendiri dan menghendaki kebebasan untuk menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan semua. Dengan demikian, keduanya harus hidup dalam suasana kerja sama yang erat (Suharyo, 2009: 50-51).

Secara khusus hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Gereja Katolik di Indonesia, Suharyo mengutip dokumen KWI berjudul “Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila”. Beberapa kesimpulan

penting yang dipetiknyanya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk dalam satu NKRI. *Kedua*, Pancasila merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi sehingga dapat disebut sebagai pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Statuta KWI 1987, bahwa “Dalam terang iman Katolik, KWI berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. *Ketiga*, nilai-nilai kemanusiaan luhur yang terkandung dalam Pancasila terdapat juga dalam ajaran Gereja. *Keempat*, dalam terang iman Katolik, Gereja menerima Pancasila. *Kelima*, Gereja Katolik sangat menghargai Pancasila bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka, dinamis, dan kreatif, dalam wawasan persatuan, kebersamaan, dan kemanusiaan luhur bangsa kita (Suharyo, 2009: 51-53).

Selain itu, Suharyo juga menyinggung kembali etika politik yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Secara lugas dan sederhana, ia menyebut bahwa politik menurut ajaran Gereja Katolik hanya dua kata, yaitu kesejahteraan umum, *common good*, *bonum commune*. Politik Katolik adalah perjuangan bagi kesejahteraan bersama (Suharyo, 2009: 66-70).

Dalam hal yang konkret, nilai-nilai Pancasila dikampanyekan oleh Suharyo. Ia memasukkan Pancasila dalam Arah Dasar (Ardas) KAJ 2016-2020. “Inilah cara kita menjawab tanggung jawab sejarah dalam rangka 210 tahun KAJ dan cara konkret menjadi saksi-saksi Injil,” ungkapnya. Tidak sampai di situ, Suharyo juga

mencetuskan Rosario Merah Putih. Pada awalnya, doa ini merupakan bentuk devosi pribadinya yang diangkat menjadi devosi yang sifatnya sosial dan berdampak pada kehidupan nyata. Berdoa Rosario Merah Putih juga menjadi salah satu ungkapan cinta umat beriman kepada Tanah Air dan tanda kepedulian untuk terus-menerus mengamalkan Pancasila dalam NKRI (Sularto & Kunchayono, 2017: 232-240).

Penegasan Suharyo atas pentingnya Pancasila bagi orang Katolik di Indonesia diucapkannya saat ia terpilih menjadi kardinal. Pada 5 September 2019, ia menerima berita pengangkatan dirinya sebagai kardinal ketiga dari Indonesia. Oleh sebab itu, Suharyo menyebut dalam wawancaranya bersama Majalah *HIDUP* bahwa ia sungguh mengagumi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menjadikannya sebagai prioritas dalam menjalankan karya pastoral. “Saya ingin Pancasila dapat menginspirasi iman umat Katolik untuk mengembangkan rasa cinta tanah air. Ini warisan yang amat berharga bagi bangsa dari para perintis,” ujarnya (Wuarmanuk, 2019: 17).

Dengan demikian, Suharyo kembali menegaskan bahwa suatu hubungan yang harmonis bahwa Pancasila di satu sisi turut mendukung pertumbuhan iman umat Katolik dan Pancasila juga di sisi lain dapat diterima dalam terang iman Katolik.

C. Simpulan

Pemikiran para pemuka agama Katolik yang diulas dalam artikel ini, Soegijapranata, Drijarkara, Magnis-Suseno, Darmaatmadja, dan Suharyo, berkontribusi penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta relevan dengan situasi dewasa ini, terutama saat fenomena keindonesiaan makin marak

dan hangat dalam berbagai diskursus dan perdebatan yang ada. Dalam kaitannya dengan persoalan ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila, kelima pemuka agama Katolik tadi sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran iman Katolik. Berbagai pemikiran diutarakan dengan tujuan serupa, yaitu menyadarkan umat Katolik secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umum bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang “terbaik” dengan situasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini. Di samping itu, sejumlah gagasan kunci juga diutarakan, mulai dari hubungan antara agama dan negara, pendidikan, etika politik, kesejahteraan umum, hingga panggilan hidup. Pada intinya, gagasan-gagasan tersebut memperkuat keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran iman Katolik, sebagaimana tercermin dalam sabda Kitab Suci dan ajaran resmi Gereja Katolik. Pada akhirnya, pemikiran-pemikiran para pemuka agama Katolik tersebut hendak mengingatkan satu hal penting, yaitu tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, secara khusus orang Katolik, baik hierarki, biarawan-biarawati, maupun umat awam, untuk memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, semboyan “100% Katolik 100% Indonesia” makin membumi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaatmadja, Y. K. (2019). *Umat Katolik Dipanggil Membangun NKRI: Dalam Terang Iman Katolik Mengamalkan Pancasila untuk Menggapai Damai Sejahtera Dunia Akhirat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaatmadja, Y. K. (2020a). *Menjadi Katolik, Nasionalis, dan Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaatmadja, Y. K. (2020b). *Menjadi*

- Katolik, Nasionalis, dan Pancasila*
Sejati 2: Bangkit dari Keterpurukan.
Yogyakarta: Kanisius.
- Gonggong, A. (1983). *Mgr. Albertus Sugiyopranoto.* Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kristiyanto, A. E. (2015). *Seandainya Indonesia Tanpa Katolik: Jalan Merawat Ingatan.* Jakarta: Obor.
- Magnis-Suseno, F. (2017). *Katolik Itu Apa? Sosok-Ajaran-Kesaksiannya.* Yogyakarta: Kanisius.
- Muskens, M. P. M. (1973). *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid 4: Pengintegrasian di Alam Indonesia.* Jakarta: Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia.
- Nawawi, H. H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sastrapratedja, M. (2016). Pancasila dalam Perspektif Etika Politik Pasca-Tradisional menurut Franz Magnis-Suseno. In F. B. Hardiman (Ed.), *Franz Magnis-Suseno: Sosok dan Pemikirannya.* Jakarta: Kompas.
- Subanar, G. B. (2003). *Soegija: Si Anak Betlehem van Java.* Yogyakarta: Kanisius.
- Sudiarja, A., Subanar, G. B., Sunardi, S., & Sarkim, T. (Eds.). (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharyo, I. (2009). *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita.* Yogyakarta: Kanisius.
- Sularto, S. & Kuncahyono, T. (2017). *Biografi Mgr. Ignatius Suharyo 20 Tahun sebagai Uskup: Terima Kasih, Baik, Lanjutkan.* Jakarta: Obor.
- Treurini, F. (2013). *Driyarkara Si Jenthu: Napak Tilas Filsuf Pendidik (1913-1967).* Jakarta: Kompas.
- Utami, A. (2012). *Soegija 100% Indonesia.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wuarmanuk, Y. H. (2019). Hadiah Toleransi Vatikan untuk Indonesia. *Hidup*, 16-17.